



Abdullah Faqih/SMERU

# INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF (IPEI) KABUPATEN KETAPANG: INKLUSIVITAS RENDAH DI TENGAH TINGGINYA PERTUMBUHAN EKONOMI

M. Sulton Mawardi, Kholifatin Artika, Fajar Nurhaditia Putra, Abdullah Faqih, Wandira Larasati

## SOROTAN

- Selama periode 2011–2021, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, berada di bawah capaian rata-rata nasional. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang yang lebih tinggi daripada angka nasional maupun provinsinya tidak diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan yang proporsional.
- Kendala yang dihadapi Kabupaten Ketapang dalam mencapai pembangunan ekonomi inklusif mencakup wilayahnya yang sangat luas, populasinya yang kecil, dan kapasitas fiskal riilnya yang rendah. Hal ini berdampak pada rendahnya kapasitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang dalam menyediakan baik infrastruktur dasar maupun pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.
- Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif tanpa terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Kabupaten Ketapang dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan sektor investasi; memperbaiki kualitas ketenagakerjaan; dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat dalam penyediaan infrastruktur pendidikan.

Didukung oleh:

# PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KETAPANG YANG TINGGI

Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai luas wilayah sebesar 31.588 km<sup>2</sup> atau setara dengan Provinsi Jawa Tengah (32.801 km<sup>2</sup>). Namun, per 2020, populasinya hanya sekitar 570.700 jiwa dengan rata-rata kepadatan sebesar 16 jiwa/km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Ketapang, 2021). Distribusi penduduk Kabupaten Ketapang juga sangat timpang; kepadatan penduduk antarkecamatan berkisar dari 3 jiwa/km<sup>2</sup> (Kecamatan Hulu Sungai) sampai 1.225 jiwa/km<sup>2</sup> (Kecamatan Delta Pawan).

Kabupaten Ketapang memiliki sumber daya alam yang berkontribusi besar terhadap perekonomiannya. Pada 2020, sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian) memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), yaitu masing-masing sebesar 23,46% dan 22,86%. Sementara itu, sektor sekunder (industri pengolahan) berkontribusi sebesar 13,34% (Gambar 1).

Gambar 1. Persentase Distribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ketapang, 2020



Sumber: BPS, 2022 (diolah).

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga berperan penting dalam serapan tenaga kerja. Pada 2020, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas

yang bekerja pada lapangan pekerjaan utama di sektor pertanian mencapai 51%, sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan jasa masing-masing sebesar 17,61% dan 31,39%.<sup>1</sup>

Selama 2016–2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang terbilang tinggi. Selama periode 2016–2019, yaitu sebelum pandemi, penyakit coronavirus 2019 (COVID-19), rata-rata pertumbuhannya 7,47% per tahun—di atas rata-rata nasional (5,07%) dan Provinsi Kalimantan Barat (5,13%). Selama pandemi, pertumbuhan ekonominya negatif 0,5% (2020) dan positif 5,23% (2021). Ini juga lebih baik daripada capaian nasional dan Kalimantan Barat (Gambar 2).

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ketapang, 2016–2021



Sumber: BPS, 2022 (diolah).

Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis menjamin pembangunan ekonomi yang inklusif, sebagaimana tercermin dari IPEI. Pertumbuhan ekonomi hanyalah satu dari 21 indikator pembentuk IPEI. Capaian Kabupaten Ketapang pada indikator IPEI lainnya tidak sebaik capaiannya pada indikator pertumbuhan ekonomi. Beberapa indikator yang capaiannya lebih rendah daripada capaian nasional dan provinsi meliputi tingkat kemiskinan, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB, rasio jalan mantap terhadap luas wilayah, angka harapan lama sekolah (AHLs), dan proporsi penduduk yang bekerja dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) ke

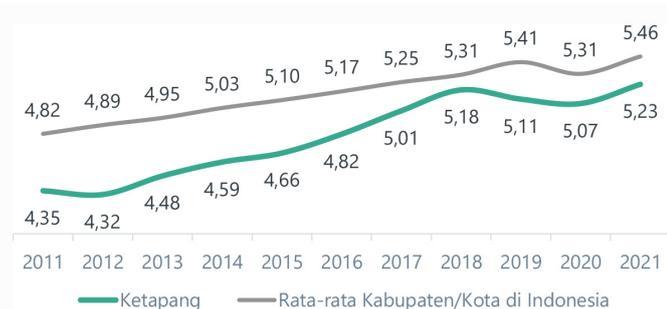


Proyek strategis nasional di Ketapang

<sup>1</sup> Sektor manufaktur adalah gabungan dari sektor i) pertambangan dan penggalian; ii) industri pengolahan; iii) listrik dan gas; iv) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; dan v) bangunan. Sektor jasa terdiri atas gabungan sektor i) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; ii) penyediaan akomodasi dan makan minum; iii) transportasi dan pergudangan; iv) informasi dan komunikasi; v) jasa keuangan dan asuransi; vi) real estat; vii) jasa perusahaan; dan viii) jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

atas. Akibatnya, selama periode 2011–2021, capaian IPEI Kabupaten Ketapang lebih rendah daripada capaian rata-rata kabupaten/kota di Indonesia (Gambar 3).

Gambar 3. Capaian IPEI Kabupaten Ketapang, 2011–2021



Sumber: BPS, 2022 (diolah).

## INKLUSIVITAS PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN KETAPANG

IPEI yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan indeks komposit yang mencakup 21 Indikator. Meskipun demikian, catatan penelitian ini berfokus pada beberapa indikator IPEI Kabupaten Ketapang yang: (i) nilainya relatif rendah dibandingkan nilai nasional dan/atau Provinsi Kalimantan Barat dan (ii) mempunyai kausalitas yang relatif tinggi dibandingkan dengan indikator lainnya.

### Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan yang Tinggi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai dimensinya merupakan faktor penting bagi pembangunan. Namun, pertumbuhan ekonomi sendiri tidak otomatis dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Kajian De Silva dan Sumarto (2013) menunjukkan bahwa masyarakat miskin menerima proporsi manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil daripada kelompok masyarakat nonmiskin.

Terkait hal tersebut, Kabupaten Ketapang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya yang tinggi belum mampu menghasilkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah (Gambar 4). Dibandingkan dengan angka nasional dan Provinsi Kalimantan Barat, tingkat pertumbuhan ekonominya yang lebih tinggi tidak diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan yang proporsional. Secara teknis, ini berarti elastisitas pertumbuhannya terhadap penurunan tingkat kemiskinan rendah. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah bahwa sektor ekonomi yang bertumbuh tinggi bukanlah sektor yang merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat sehingga kurang berdampak terhadap peningkatan pendapatan mereka.

Selama 2016–2021, sektor ekonomi yang berperan penting terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang adalah sektor pertambangan dan galian yang rata-rata mencapai 18,19% per tahun. Bahkan pada 2020, ketika beberapa sektor ekonomi lainnya tumbuh negatif, sektor ini masih mampu tumbuh 15,85%. Sementara itu,

sektor pertanian dan sektor manufaktur yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar rata-rata hanya tumbuh 4,38% dan 4,51%.

Gambar 4. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ketapang, 2011–2021



Sumber: BPS, 2022 (diolah).

### Kontribusi Sektor Ekonomi Primer Belum Optimal

Kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Kabupaten Ketapang memang besar, tetapi belum optimal. Sebagai contoh, di subsektor perkebunan rakyat kelapa sawit, karet, dan kelapa hibrida, rata-rata produktivitasnya lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Kalimantan Barat dan daerah lain. Untuk sawit rakyat, produktivitasnya baru mencapai 2,18 ton/ha, masih lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Kalimantan Barat (2,19 ton/ha), Provinsi Sumatra Utara (3,71 ton/ha), dan Kabupaten Asahan (4,70 ton/ha). Kondisi demikian juga terjadi pada komoditas karet dan kelapa hibrida (Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan Rata-Rata Produktivitas Perkebunan Rakyat di Beberapa Daerah, 2021 (ton/ha/bulan)

Wilayah	Kelapa Sawit	Karet	Kelapa Hibrida
Ketapang	2,18	0,49	0,16
Kalimantan Barat	2,19	0,46	0,38
Asahan (Sumut)	4,70	0,99	0,21
Sumatra Utara	3,71	0,83	0,91

Sumber: BPS, 2022 (diolah).

Implikasinya adalah tingkat pendapatan petani kebun rakyat per unit luasan di Kabupaten Ketapang lebih rendah daripada daerah lainnya. Produktivitas yang rendah ini juga berarti pertumbuhan nilai keluarannya tertinggal dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor ekonomi primer yang produktivitasnya belum optimal merupakan salah satu faktor penjelas fenomena pertumbuhan ekonomi tinggi yang dibarengi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Secara teknis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan produktivitas perkebunan rakyat di Kabupaten Ketapang

belum optimal. Pertama, petani pada umumnya tidak menggunakan bibit unggul karena kurangnya penyuluhan sehingga pengetahuan mereka rendah dan/atau karena harga bibit unggul yang mahal. Petani kelapa sawit yang tidak menggunakan bibit unggul berpeluang kehilangan hasil produksi hingga 50% (Irawan dan Purwanto, 2020). Kedua, pengelolaan kebun tidak sesuai standar budidaya sawit yang baik. Ketiga, kelembagaan petani masih lemah sehingga akses mereka terhadap kredit perbankan dan legalitas lahan rendah. Temuan Irawan dan Purwanto (2020) menunjukkan rendahnya minat petani kelapa sawit Kabupaten Ketapang untuk melakukan sertifikasi lahan karena sebagian besar tidak mengetahui cara dan manfaat sertifikasi lahan akibat tidak adanya sosialisasi. Keempat, petani kecil membutuhkan modal tambahan, seperti dari kredit perbankan, untuk mengelola kebunnya. Namun, Sahara dan Kusumowardhani (2017) menyatakan bahwa salah satu penghambat bagi mereka untuk memperoleh kredit perbankan adalah karena mereka tidak memiliki legalitas/sertifikat kebun sebagai agunan kredit.

### Belum Optimalnya Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang masuk ke Kabupaten Ketapang pun cukup besar. Sebagai contoh, pada Triwulan IV 2020, tiga daerah di Kalimantan Barat yang menerima kredit korporasi terbesar adalah Kota Pontianak (9,79 triliun rupiah), Kabupaten Ketapang (6,75 triliun rupiah), dan Kabupaten Sintang (5,64 triliun rupiah). Sebagian besar kredit ini diinvestasikan pada lapangan usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan (63,85%), serta lapangan usaha industri pengolahan (10,81%) (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, 2021).

Seorang responden<sup>2</sup> menyatakan bahwa pada 2021, Kabupaten Ketapang juga menerima investasi PMA paling tinggi dibandingkan daerah lain di Kalimantan Barat. Jumlahnya 320 juta dolar AS untuk 341 proyek. Namun, menurut responden, investasi tersebut adalah investasi “yang berjarak dengan masyarakat”. Artinya, investasi

tersebut berada di sektor ekonomi yang penyerapan tenaga kerjanya rendah, yakni di industri hulu, seperti sektor perkebunan besar dan sektor pertambangan, yang merupakan penghasil produk primer (bahan baku). Investasi demikian tidak berkaitan langsung dengan peningkatan nilai tambah komoditas yang dihasilkan oleh mayoritas masyarakat. Akibatnya, meskipun pertumbuhan kedua sektor tersebut tinggi, dampaknya terhadap pendapatan masyarakat luas kurang signifikan. Hal ini makin menguatkan fenomena pertumbuhan ekonomi tinggi dan kemiskinan tinggi di Kabupaten Ketapang.

### Perlunya Peningkatan Infrastruktur Jalan

Secara umum, ketersediaan dan kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Ketapang masih memerlukan banyak peningkatan. Salah satu isu penting yang mengemuka dari berbagai diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara mendalam adalah isu konektivitas, yakni ketersediaan dan kualitas prasarana jalan darat, baik jaringan jalan di dalam maupun jaringan yang menghubungkan Kabupaten Ketapang dengan sekitarnya. Persoalannya, antara lain, berkisar pada ruas jalan kabupaten yang sangat panjang, yakni 3.229,09 km yang menghubungkan berbagai kecamatan/desa. Panjang ruas jalan ini belum mencukupi karena masih ada sekitar 40% desa (dari 253 desa) yang terisolasi dan hanya dapat diakses melalui sungai. Tabel 2 dan Gambar 5 menunjukkan bahwa meskipun dari tahun ke tahun proporsi jalan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) terus meningkat, sebagian besar jalan masih dalam kondisi rusak (berat dan ringan). Akibatnya, dalam satu dekade terakhir, capaian kondisi jalan mantap di Kabupaten Ketapang selalu berada di bawah capaian nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.

Banyak kajian yang menyimpulkan bahwa ketercukupan dan kualitas infrastruktur merupakan prasyarat penting untuk terselenggaranya pembangunan di berbagai bidang (Deno, 1988; Haughton dan Khandker, 2009). Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi berbagai sektor ekonomi tidak dapat berfungsi (Hirschman, 1958). Kondisi jalan yang buruk tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga menghambat penyediaan infrastruktur lainnya, seperti jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Tabel 2. Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Ketapang, 2016–2022

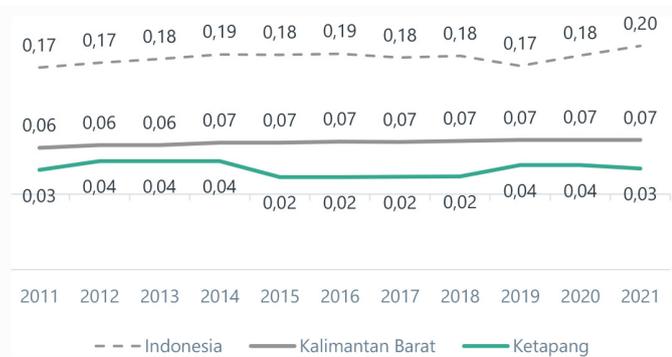
Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Baik	13,7%	15,2%	16,8%	26,8%	28,2%	28,19%	27,31%
Sedang	6,2%	6,1%	5,9%	10,3%	9,2%	9,18%	5,62%
Rusak Ringan	12,4%	12,2%	12,0%	24,5%	27,2%	27,20%	32,49%
Rusak Berat	67,7%	66,4%	65,4%	38,5%	35,4%	35,43%	34,57%
Jumlah Keseluruhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Keseluruhan (km)	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021–2026.

<sup>2</sup> Pakar ekonomi di Universitas Tanjungpura, Pontianak.

dan jaringan telekomunikasi. Pada 2021, elektrifikasi di Ketapang baru mencapai 82% (Kalimantan Barat 87% dan nasional 97%) dan ada 60 desa yang belum terlayani listrik PLN. Sementara itu, listrik mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Hapsari, 2011).

Gambar 5. Perbandingan Rasio Jalan Mantap terhadap Luas Wilayah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional, 2011–2021



Sumber: BPS, diolah (2022).

Terkait telekomunikasi, saat ini terdapat 89 desa yang merupakan *blank spot* dan sekitar 76 desa yang tidak mempunyai akses sinyal telepon genggam. Menurut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, hal ini terjadi, antara lain, karena infrastruktur penunjang di kawasan tersebut (kondisi jalan dan ketersediaan listrik) tidak memadai. Ruas jalan menuju ke desa yang belum mendapatkan sinyal umumnya rusak dan bahkan ada yang sama sekali belum pernah diaspal. Hampir semua daerah yang tidak memiliki sinyal merupakan daerah yang belum dijangkau oleh listrik PLN. Kualitas jalan yang buruk juga menghambat mobilitas masyarakat untuk mengakses layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Hal ini menggarisbawahi bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur dasar lainnya mempunyai efek domino terhadap berbagai dimensi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Capaian indikator rasio jalan mantap yang rendah terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran, baik anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat (khususnya dana alokasi khusus/DAK) maupun yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Selama 2016–2020, Kabupaten Ketapang rata-rata menerima DAK fisik dan nonfisik sebesar 355,7 miliar rupiah per tahun, tetapi alokasi untuk bidang jalan hanya sekitar 10% dari jumlah tersebut. Misalnya, pada 2019, Kabupaten Ketapang menerima alokasi DAK jalan sebesar 29 miliar rupiah dan pada 2021 sebesar 36 miliar rupiah. Selain DAK, Pemkab Ketapang juga mengalokasikan anggaran rutin pemeliharaan jalan sekitar 20 miliar rupiah per tahun. Keseluruhan anggaran ini sangat tidak memadai untuk meningkatkan ruas jalan yang panjangnya 3.200 km menjadi jalan dengan status mantap. Terlebih lagi, pembangunan jalan di Ketapang yang mayoritas lahannya gambut memerlukan unit biaya yang lebih besar daripada lahan nongambut.

Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang, biaya rehabilitasi/pembangunan jalan di Kabupaten Ketapang berkisar 1 miliar–12,5 miliar rupiah per km, tergantung kedalaman gambut.

Kebutuhan anggaran pembangunan/rehabilitasi jalan yang begitu besar tidak mungkin dipenuhi oleh APBD Kabupaten Ketapang karena kapasitas fiskal riilnya sangat kecil. Tabel 3 menunjukkan bahwa meskipun dalam lima tahun ke depan proyeksi besaran APBD Kabupaten Ketapang berkisar 2,5–2,9 triliun rupiah per tahun, kapasitas riil keuangan daerahnya hanya berkisar 58–84 miliar rupiah per tahun. Hal ini terjadi karena sebagian besar APBD (sekitar 97%) dialokasikan untuk belanja yang sifatnya mengikat, wajib, dan prioritas utama (berkaitan dengan layanan dasar) sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemkab Ketapang telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemprov Kalimantan Barat agar beberapa ruas jalan kabupaten yang bernilai strategis dijadikan jalan nasional/provinsi. Tujuannya adalah agar pembiayaan pembangunan jalan-jalan ini nantinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan pemprov. Per Juni 2022, Pemprov Kalimantan Barat telah menyetujui tujuh ruas jalan kabupaten (sekitar 178 km) sebagai jalan provinsi (Agustiandi (ed.), 2022).



Kelapa sawit hasil panen

Tabel 3. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang (dalam Miliar Rupiah), 2022–2026

Keterangan	Tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Pendapatan	2451,5	2570,6	2684,7	2804,3	2943,7
2. Pencairan Dana Cadangan					
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	55,7	49,6	47,2	46,4	43,0
Total Penerimaan	2507,2	2620,33	2731,94	2850,74	2986,82
Dikurangi:					
4. Jumlah Belanja Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama	2449,6	2562,5	2669,2	2783,5	2902,8
5. Kapasitas Riil Keuangan Daerah	57,6	57,8	62,7	67,1	83,9
6. Persentase Kapasitas Riil Keuangan Daerah terhadap APBD	2,30%	2,21%	2,30%	2,36%	2,81%

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021–2026.

### Kualitas SDM yang Relatif Rendah

Pada 2020, proporsi angkatan kerja di Kabupaten Ketapang yang berpendidikan SMA<sup>3</sup> dan perguruan tinggi masing-masing sebesar 44,77% dan 7,59%. Sisanya adalah lulusan sekolah dasar/SD<sup>4</sup> (39,43%) dan tidak memiliki ijazah SD (8,31%). Ini berarti lebih dari setengah angkatan kerja di Ketapang berpendidikan menengah ke atas. Meskipun demikian, selama 2011–2021, proporsi penduduk yang bekerja dengan pendidikan tingkat SMA ke atas selalu lebih rendah daripada Kalimantan Barat dan nasional (Gambar 6). Secara diametral, hal ini berarti proporsi penganggur terbuka di Ketapang yang berpendidikan SMA ke atas lebih tinggi daripada Kalimantan Barat dan nasional.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya proporsi tersebut. Pertama, sebagian responden menyebutkan bahwa lapangan kerja yang banyak tersedia di Kabupaten Ketapang adalah sebagai buruh perkebunan kelapa sawit. Kesempatan kerja seperti ini kurang menarik bagi angkatan kerja yang berpendidikan SMA ke atas.

Faktor kedua terkait kualitas SDM sebagaimana tercermin dari capaian AHLIS Ketapang yang lebih rendah

Gambar 6. Persentase Penduduk Bekerja dengan Pendidikan SMA ke Atas di Kabupaten Ketapang, 2011–2021



Sumber: BPS, 2022 (diolah).

<sup>3</sup> SMA/ialih, SMK, dan Paket C.

<sup>4</sup> Tidak/belum tamat SD, SD/ibtidaiah, Paket A, SMP/sanawiah, SMP kejuruan, dan Paket B.

daripada Kalimantan Barat dan nasional (Gambar 7). Jika kesenjangan ini terus berlangsung, dalam jangka panjang, kualitas SDM Ketapang akan terus tertinggal. Menurut responden, hal ini terjadi, antara lain, karena akses ke sekolah setingkat SMA masih terbatas. Hal ini merupakan dampak konektivitas yang belum memadai dan/atau jarak sekolah yang terlalu jauh dari domisili siswa. Akibatnya, sebagian lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA karena memerlukan biaya transportasi yang terasa mahal, terutama bagi keluarga miskin. Selain itu, kewenangan pembangunan sekolah setingkat SMA berada di pemerintahan provinsi sehingga ketercukupan sekolah SMA di tingkat kabupaten bergantung pada anggaran yang tersedia di provinsi. Sementara itu, seorang responden lainnya menyatakan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Ketapang adalah di bidang infrastruktur, bukan SDM.



Buruh perkebunan kelapa sawit sedang panen

Gambar 7. AHLS Kabupaten Ketapang, 2011–2021



Sumber: BPS, 2022 (diolah).

## Upaya Pemkab Ketapang untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021–2026, Pemkab Ketapang telah menuangkan berbagai permasalahan yang selaras dengan temuan kajian ini. Telah dirumuskan pula strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasinya. Selain itu, pemkab telah mengeluarkan beberapa produk hukum untuk meningkatkan capaian berbagai dimensi pembangunan, baik ekonomi maupun sosial. Salah satunya adalah Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal yang bertujuan menarik investor dengan memberikan skema insentif daerah. Insentifnya antara lain berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi daerah, serta pemberian bantuan modal kepada UMKM dan koperasi.

Untuk menanggulangi kemiskinan yang masih tinggi, Bupati Kabupaten Ketapang menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 42 Tahun 2018 tentang Pendataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Data Masyarakat Miskin di Kabupaten Ketapang; dan Perbup No. 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan di Kabupaten Ketapang. Kedua perbup ini pada dasarnya merupakan upaya agar penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ketapang lebih akurat, sinergis, dan komprehensif.

Selain menetapkan kebijakan dan program dalam perencanaan reguler, pada Januari 2022, Bupati Ketapang telah menetapkan sepuluh proyek strategis daerah sebagai bagian dari perwujudan visi-misi bupati, yakni:

1. pengembangan *food estate* dan kawasan agropolitan,
2. pengembangan Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala Tolak-Kuala Satong,
3. pengembangan Bandara Rahadi Usman,
4. penataan pelabuhan dan bandara,
5. peningkatan jalan ruas kabupaten serta pembangunan ruas jalan baru dan Jembatan Pawan 6,
6. pengembangan Desa Fokus dan Desa Mapan,
7. pembangunan universitas negeri,
8. peningkatan tipe rumah sakit,
9. pelestarian dan pengembangan budaya daerah, dan
10. persiapan pembentukan daerah otonomi baru.<sup>5</sup>

Keseluruhan proyek itu memerlukan biaya yang besar dan kewenangannya tidak sepenuhnya berada dalam ranah pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, pada Mei 2022, Bupati telah mengajukan empat proyek menjadi proyek strategis nasional kepada Pemerintah Pusat (Menko Perekonomian), yakni (i) pengembangan *food estate* dan kawasan agropolitan, (ii) pengembangan Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala Tolak-Kuala Satong, (iii) pengembangan Bandara Rahadi Usman, dan (iv) penataan pelabuhan dan bandara.

## PENUTUP

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan upaya pembangunan multidimensi yang bersifat simultan. Keterkaitan antarindikator yang membentuknya umumnya bersifat kausalitas dan/atau harus bergerak ke arah yang selaras. Dalam konteks ini, Kabupaten Ketapang mengalami kesulitan mewujudkannya secara cepat. Faktor



Pemda Ketapang berbenah untuk mempercepat pembangunan fasilitas umum

<sup>5</sup> Pemerintah memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sejak 2014 dan sampai saat ini belum mencabutnya. Meskipun demikian, pada masa mendatang pemekaran Kabupaten Ketapang menjadi dua atau tiga DOB dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan wilayah tersebut.

dominan yang melatarinya adalah wilayahnya sangat luas, jumlah penduduknya kecil, dan kapasitas fiskal riilnya kecil.

Ketiga faktor ini memengaruhi kapasitas Pemkab Ketapang dalam menyediakan infrastruktur dasar maupun pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan sumber daya alamnya. Akibatnya, sampai saat ini tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah yang, antara lain, tercermin dari tingkat kemiskinannya yang tinggi.

Berdasarkan hal itu, upaya Pemkab Ketapang untuk mengalihkan pembangunan beberapa ruas jalan dan proyek strategis daerah menjadi jalan/proyek strategis nasional dan/atau provinsi merupakan langkah yang tepat. Jika upaya ini berhasil, maka beberapa kendala pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Ketapang akan lebih cepat teratasi.

Di luar upaya tersebut—yang keberhasilannya sangat tergantung pada otoritas eksternal Pemerintah Pusat dan provinsi—Pemkab Ketapang dapat mengejar ketertinggalan inklusivitas pembangunannya berdasarkan kewenangan pemerintahan yang dimilikinya. Beberapa upaya yang

dapat dilakukan Pemkab Ketapang dan dengan biaya yang tidak terlalu membebani APBD-nya adalah:

1. mengoptimalkan kinerja penyuluh pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani (dalam arti luas),
2. memfasilitasi petani agar mendapatkan kredit sebagai tambahan modal operasional usaha tani dari lembaga perbankan,
3. memfasilitasi industri kecil menengah (IKM) dan UMKM dengan tahapan-tahapan bimbingan vokasional secara terencana dan berkesinambungan,
4. memberikan insentif yang lebih besar bagi investor yang bergerak di sektor ekonomi sekunder dan/atau yang menyerap tenaga kerja lebih banyak per satuan biaya investasi dan/atau investasi yang menyerap bahan baku yang diproduksi oleh mayoritas masyarakat,
5. memetakan ketersediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kerja yang sejalan dengan kebutuhan investor di sektor sekunder tersebut, dan
6. mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membangun sekolah menengah berasrama untuk mengatasi masalah akses geografis bagi siswa. ■

## DAFTAR ACUAN

Agustiandi (ed.) (2022) '7 Ruas Jalan Kabupaten Ketapang Alih Status Jadi Jalan Provinsi.' *Suara Ketapang* 18 Juni <<https://ketapang.suarakalbar.co.id/2022/06/7-ruas-jalan-kabupaten-ketapang-alih.html>> [18 Juni 2022].

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang (2021) *Kabupaten Ketapang Dalam Angka 2021*. Ketapang: BPS Kabupaten <<https://ketapangkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/fce616d39dd6eccd83ee43ab/kabupaten-ketapang-dalam-angka-2021.html>> [13 Juni 2022].

———. (2020) *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Ketapang 2020*. Ketapang: BPS Kabupaten Ketapang <<https://ketapangkab.bps.go.id/publication/2021/12/30/bb8c5ed50ee99790a07b6a67/statistik-ketenagakerjaan-kabupaten-ketapang-2020.html>> [13 Juni 2022].

Deno, Kevin T. (1988) 'The Effect of Public Capital on US Manufacturing Activity: 1970 to 1978.' *Southern Economic Journal* 55 (2): 400–411. DOI: 10.2307/1059112.

Hapsari, Tunjung (2011) *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker (2009) *Handbook on Poverty and Equality*. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-0-8213-7613-3.

Hirschman, Albert O. (1958) *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.

Irawan, Ujang S. dan Edi Purwanto (2020) 'Profile of Smallholder Oil-palm Plantation in Ketapang District.' Bogor: Tropenbos Indonesia <<https://www.tropenbos-indonesia.org/resources/publications/profile+of+smallholder+oil-palm+plantation+in+ketapang+district+>> [21 Juli 2022].

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (2021) *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat Februari 2021*. Provinsi Kalimantan Barat Kantor Perwakilan Bank Indonesia <<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan%20Perekonomian%20Provinsi%20Kalimantan%20Barat%20Feb%202021.pdf>> [14 Juni 2022].

Sahara, Haryadi dan Nuning Kusumowardhani (2017) 'Smallholder Finance in the Palm Oil Sector: Analyzing the Gaps between Existing Credit Schemes and Smallholder Realities.' Infobrief No. 185. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR). DOI: 10.17528/cifor/006582.

### Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021–2026.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 6 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Bupati Ketapang No. 42 Tahun 2018 tentang Pendataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Data Masyarakat Miskin di Kabupaten Ketapang.

Peraturan Bupati Ketapang No. 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ketapang.



SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat dan tepat waktu dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Jl. Cikini Raya No. 10A,  
Jakarta 10330 Indonesia

☎ 6221-3193 6336

☎ 6221-3193 0850

✉ [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id)

🌐 [smeru.or.id](http://smeru.or.id)

📺 @SMERUInstitute

📍 The SMERU Research Institute

📷 @smeru.institute

The SMERU  
Research Institute

Editor:  
Dhanita Putri Sarahitka

Desain dan Tata Letak:  
Novita Maizir  
Heru Sutapa

©2022 SMERU  
Untuk catatan penelitian  
lainnya, silakan kunjungi  
[smeru.or.id](http://smeru.or.id).



Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam catatan penelitian ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Saran Sitasi:  
Mawardi, M. Sulton, Kholifatin Artika, Fajar Nurhaditia Putra, Abdullah Faqih, dan Wandira Larasati (2022) 'Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Ketapang: Inklusivitas Rendah di Tengah Tingginya Pertumbuhan Ekonomi.' Catatan Penelitian No. 4. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Untuk versi digital, tambahkan:  
<URL> [tanggal akses].